

Kedaulatan Rakyat 28/7/03

## SUBSIDI TERSELUBUNG

Sofian Effendi<sup>1</sup>

Sekitar tahun 1980an, seorang sosiolog Amerika, Diane Wolf, mengadakan studi lapangan di Ungaran untuk meneliti adanya hubungan eksploitatif antara industri manufaktur dengan sektor informal. Pada masa itu industri manufaktur sedang berkembang pesat di kota dekat Semarang tersebut. Kesimpulan peneliti amat menarik, kemajuan industri manufaktur yang bermodal besar ternyata mendapat subsidi terselubung dari para bakul, warteg, salon kelas kampung, tukang becak, serta warung grabah. Lho kok aneh. Si miskin menyubsidi si pemodal besar?

Ternyata para pemilik industri manufaktur dapat meraup untung karena upah yang dibayar kepada para buruh sebenarnya amat rendah, jauh dibawah standar upah minimal. Bagaimana *survial strategy* para buruh agar dapat bertahan hidup dengan upah subsisten? Disinilah para pelaku sektor formal amat berjasa. Merekalah yang menopang hidup para buruh yang berupah murah dengan menjual produk dan jasa pakai harga subsisten.

Di restoran, harga sepiring gado-gado bisa mencapai Rp. 25 ribu rupiah dan segelas es teh harganya mencapai Rp. 9-10 ribu rupiah. Tetapi di warteg, gado-gado yang tidak kalah enakya dan segelas teh gitel, legi *lan* kenthel, harganya paling-paling hanya sepersepuluh harga restoran. Demikian juga sektor jasa. Di kapsalon Rudy Hadisuwarno sekali *creambath* dan potong rambut biayanya bisa Rp. 50 ribu. Di kapsalon dinding gedeg di gang sempit di Ungaran, biaya potong rambut lengkap dengan keramas, bahasa gang-an untuk *creambath*, tak sampai Rp. 10 ribu rupiah. Hasilnya sama, ketombe hilang dari kepala dan rambut menjadi rapi dan bersinar kembali. Orang nggak tahu mana hasil potongan Rudy dan mana potongan Atun, yang juga buka salon dalam sinetron Si Doel Anak Sekolah.

Dari observasi atas hubungan kedua sektor ekonomi di Ungaran tersebut, Diane menyimpulkan adanya subsidi terselubung dari sektor informal yang bermodal pas-pasan. kepada sektor formal yang bermodal besar. Subsidi tersebut terjadi melalui transaksi harga barang dan jasa supermurah yang dikonsumsi para buruh industri manufaktur.

---

<sup>1</sup> Guru Besar Kebijakan Publik dan Rektor UGM

Di dunia perguruan tinggi juga terjadi fenomena subsidi terselubung tanpa disadari banyak orang, termasuk para mahasiswa yang sering berdemonstrasi menentang kebijakan biaya pendidikan. Di UGM, misalnya, biaya untuk pendidikan S-1 adalah Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun. Biaya tersebut berasal dari subsidi pemerintah sebesar Rp. 6 juta per mahasiswa per tahun, SPP dan BOP sebesar Rp. 2 sampai 2,25 juta, dan subsidi silang rata-rata sebesar Rp. 3 juta.

Karena anggaran amat terbatas, hanya Rp. 553 milyar per tahun, UGM belum mampu membayar pegawainya, baik yang PNS mau pun honorer, dengan standar gaji memadai. Rata-rata gaji dosen berkisar antara yang terendah Rp. 600 ribu bagi asisten ahli yang baru nol tahun masa kerjanya sampai Rp. 2,4 juta bagi guru besar yang sudah bekerja 35 tahun ke atas. Gaji tersebut jelas tidak cukup buat menopang kehidupan staf kependidikan ataupun administrasi.

Kalau para buruh di Ungaran dapat membelanjakan upahnya yang rendah di warung grabah, warteg, dan kapsalon di gang sempit, para dosen dan guru besar tak mungkin menggunakan kiat yang sama. Seorang Guru Besar bercerita bahwa gaji beliau terima setiap bulan hanya cukup untuk biaya bensin, gaji sopir, biaya langganan telepon serta untuk membayar langganan koran dan listrik.

Kita faham kalau mayoritas kebutuhan dosen hanya diperjualbelikan di lembaga-lembaga ekonomi formal. Buku hanya di jual di toko buku seperti Gramedia, Indira, dan Toga Mas. Sambungan ke jaringan Internet Global hanya diperoleh melalui lembaga jasa telekomunikasi formal seperti Telkom, Indosat, dan perusahaan ISP lainnya. Semua *establishment* tersebut tidak menerapkan harga subsisten seperti sektor informal. Mungkin hanya potong rambut bisa di bawah pohon.

Untuk menutupi kebutuhan riil masing-masing, para dosen memanfaatkan apa yang tersedia yaitu "*excess time*". Kelebihan waktu inilah yang dipakai para dosen dan pegawai untuk mencari tambahan pendapatan demi keseinambungan rumah-tangga, untuk menyekolahkan anak-anak, dan mendapat sedikit biaya hiburan. Jadi, tanpa disadari para dosen dan pegawai ini telah berjasa karena secara terselubung telah menyubsidi majikannya, UGM.

Berapa besarkah subsidi terselubung ini? Menurut estimasi Dirjen Dikti biaya layanan pendidikan tinggi yang wajar adalah Rp. 18 juta per mahasiswa per tahun untuk mencapai standar mutu nasional dan gaji 75 persen dari *billing rate* Bappenas. Padahal anggaran universitas hanya Rp. 11 juta per mahasiswa per tahun. Dari mana

diperoleh selisih sebesar Rp. 7 juta per mahasiswa untuk sebanyak 50.000 mahasiswa?

Para pembaca yang budiman, jumlah Rp. 350 milyar per tahun itu sebagian adalah subsidi terselubung dari para dosen dan karyawan supaya mereka dapat menjalankan kewajibannya di kampus. Kalau setiap dosen dan pegawai penerimaannya per bulan sama dengan *billing rate* Bappenas, setiap orang telah memberikan subsidi kepada universitas kerakyatan ini sekitar Rp 70 juta per tahun. Artinya, subsidi terselubung dari setiap dosen dan pegawai setiap tahun adalah 11 kali lebih besar dari subsidi pemerintah dan kira-kira 35 kali lebih tinggi dari uang SPP dan BOP yang dibayar para mahasiswa S-1. Mungkin setakat ini *take home pay* para dosen dan pegawai belum setinggi standar gaji konsultan yang ditetapkan Bappenas. Tetapi subsidi mereka kepada UGM masih lebih besar dari subsidi pemerintah dan SPP/BOP yang dibayar mahasiswa. Tetapi mengapa yang berdemo mahasiswa ya, bukan para dosen dan pegawai??

Yogyakarta, 25 Juli 2003